

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TANGGAL 26 FEBRUARI 2018  
 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2038

**INDIKASI PROGRAM**

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Rencana Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum</b>																								
<b>1.1</b>	<b>Zona Perikanan Budidaya / Sub Zona Budidaya Laut</b>																								
a	Penyusunan Masterplan Budidaya Laut	200	1 paket	APBN, APBD, LSM, PT	KKP, DKP Provinsi, BAPPEDA																				
b	Penataan dan pengembangan usaha perikanan budidaya berbasis masyarakat dan berkelanjutan	2.000	10 lokasi	APBN, APBD, LSM	KKP, DKP Provinsi, BAPPEDA																				
c	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut	20.000	100 unit	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP Provinsi, PU																				
d	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang budidaya laut	10.000	500 orang	APBN, APBD, Swasta, LSM, PT	KKP, DKP Provinsi																				
e	Monitoring secara berkala lingkungan budidaya laut	4.000	20 kali	APBN, APBD, LSM, PT	KKP, DKP Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup																				
f	Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya laut	40.000	20 lokasi	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP Provinsi, Swasta																				
g	Diversifikasi budidaya laut	2.000	100 unit	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP Provinsi, Swasta																				

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)											
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
h	Revitalisasi pusat perbenihan ikan laut	10.000	3 unit	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi, Swasta																											
i	Pembenahan kualitas produk perikanan budidaya laut	2.000	20 unit	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi, Swasta																											
j	Perluasan pasar budidaya laut di dalam dan luar negeri	2.000	5 negara	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi, Swasta																											
k.	Kajian daya dukung dan daya tampung di zona budidaya perikanan	1.000	1 paket	APBN, APBD	KKP, DKP Provinsi, Dinas Lingkungan																											
<b>1.2</b>	<b>Zona Perikanan Tangkap</b>																															
a	Penyusunan Masterplan perikanan tangkap Provinsi Sumatera Barat	500	1 paket	APBN, APBD, LSM	KKP, DKP Provinsi																											
b	Penyusunan Model pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan mensejahterakan, meliputi rencana, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan/ pengawasan dan pengendalian	2.000	2 unit	APBN, APBD, LSM	KKP, DKP Provinsi, BAPPEDA																											
c	Penguatan kapasitas SDM Nelayan terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, melalui kegiatan pelatihan, dan sosialisasi	1.500	100 orang	APBN, APBD, LSM	KKP, DKP Provinsi																											
d	Pembangunan sarana dan prasarana mendukung pengelolaan perikanan tangkap di Sentra Kelautan dan Perikanan	20.000	1 unit	APBN, APBD, LSM	KKP, DKP Provinsi																											
e	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan	20.000	50 unit	APBN, APBD, LSM	KKP, DKP Provinsi																											

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
f	Bantuan modal usaha perikanan tangkap	100.000	300 orang	APBN, APBD, Bank	KKP, DKP Provinsi																				
g	Peningkatan SDM nelayan	1.000	100 orang	APBN, APBD, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
h	Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.	20.000	20 unit	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi Dinas Perindustrian																				
i	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan pengolahan dan pemasaran perikanan tangkap	40.000	150 unit	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi, Dinas Perindustrian																				
j	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan tangkap	100.000	150 unit	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
k	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan	3.000	20 paket	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
l	Pembentukan dan optimalisasi peran Pokmaswas	5.000	100 kelompok	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
m	Sosialisasi pelaporan hasil tangkapan sesuai standar	1.000	20 paket	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi																				
o	Sosialisasi peraturan tentang alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan	1.000	20 paket	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
p	Sosialisasi Dokumen Wajib Kapal Penangkap kan : SIPI/SIKPI, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	1.000	20 paket	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi																				

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
q	Inventarisasi dan pemetaan alat penangkapan ikan	1.000	20 paket	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi,																				
r	Pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	1.000	20 paket	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
s	Program pemberantasan Illegal Fishing	10.000	20 paket	APBN, APBD	KKP, DKP																				
u	Program peningkatan sarana dan prasarana pengawasan	10.000	10 unit	APBN, APBD	KKP, DKP																				
t	Program penguatan SDM pengawasan	2.000	50 orang	APBN, APBD	KKP, DKP																				
w	Peningkatan operasional pengawasan	100.000	20 paket	APBN, APBD	KKP, DKP																				
x	Kajian daya dukung dan daya tampung di zona perikanan tangkap	5.000	1 paket																						
<b>1.3</b>	<b>Pelabuhan</b>																								
a	Peningkatan pelayanan kepelabuhanan;	10.000	20 unit	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub, Dishub																				
b	Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;	100.000	10 pelabuhan	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub Dishub																				
c	Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;	50.000	5 unit	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub Dishub																				
d	Penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.	2.000	15 paket	APBN, APBD, LSM	Kemenhub Dishub																				
e	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.	1.000	10 paket	APBN, APBD, Swasta, LSM	Kemenhub Dishub																				

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
f	Penyusunan detil alokasi ruang DLKR/DLKP dan WKOPP	10.000	10 unit	APBN, APBD	KememHub, DisHub, KSOP																				
g	Peningkatan status pelabuhan perikanan dari PPI ke PPP	50.000	5 unit	APBN, APBD, Swasta, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
h.	Optimalisasi peran pelabuhan perikanan sebagai dukungan terhadap pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Sumatera Barat	1.000	20 paket	APBN, APBD	KKP, DKP																				
i	Pembangunan Dermaga untuk pertahanan dan keamanan serta untuk Kepentingan Nasional	100.000	5 paket	APBN	Hankam, KPP, DKP																				
k	Kajian daya dukung dan daya tampung di zona pelabuhan	3.000	1 paket	APBN, APBD	KemenHub, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan																				
<b>1.4</b>	<b>Pariwisata</b>																								
a	Promosi dan peningkatan daya tarik serta destinasi wisata bahari.	20.000	20 paket	APBN, APBD, CSR	Dinas Pariwisata , DKP, LSM, Masyarakat																				
b	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000	100 unit	APBN, APBD, CSR	Dinas Pariwisata, DKP																				
c	Pengembangan produk wisata bahari yang sesuai karakteristik masyarakat Sumatera Barat	40.000	40 unit	APBN, APBD, CSR	Dinas Pariwisata, DKP																				
d	Peningkatan manajemen kepariwisataa	5.000	10 paket	APBN, APBD, CSR	Dinas Pariwisata																				
e	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata	2.000	500 orang	APBN, APBD, CSR	Dinas Dinas Pariwisata																				

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)						
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
f	Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal menjadi guide dan pembuatan souvenir	2.000	500 orang	APBN, APBD, CSR	Dinas Pariwisata																						
g	Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir	5.000	10 unit	APBN, APBD, CSR	Dinas Pariwisata, DKP, BLHD																						
h	Mengembangkan konsep pengelolaan pariwisata pesisir dan pulau - pulau kecil yang berkelanjutan dan mensejahterakan	5.000	10 unit	APBN, APBD, CSR	DKP Provinsi, BAPPEDA, KKP, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup																						
i	Penyusunan model pengelolaan pengembangan wisata pesisir dan pulau - pulau kecil di Kawasan Konservasi meliputi perencanaan, implementasi serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdayanya	5.000	20 unit	APBN, APBD, CSR	DKP Provinsi, BAPPEDA, KKP, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup																						
k	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai	400.000	2 unit	APBN, APBD, CSR	Kementrian Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas PU																						
l	Sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai	500	2 unit	APBN, APBD, CSR	Kementrian Pariwisata, Dinas Pariwisata																						
m	Kajian daya dukung dan daya tampung di zona pariwisata	5.000	1 pakaet	APBN APBD	Kementrian Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan																						
<b>1.5</b>	<b>Industri</b>																										

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
a	Pengembangan industri maritim (galangan kapal) menjadi industri skala menengah dan besar	10.000	3 lokasi	APBN, APBD, CSR	DKP Prov., Dinas Perindustrian, KKP																				
b.	Pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk mendukung industri maritim	10.000	10 paket	APBN, APBD, CSR	DKP Prov., Dinas Perindustrian, KKP, Dinas PU																				
c	Pengembangan pasar hasil industri dan industri maritim di dalam dan luar negeri	1.000	5 negara	APBN, APBD, CSR	DKP Prov., Dinas Perindustrian, KKP, Dinas PU																				
d	Pengembangan SDM di Industri Maritim	2.000	50 orang	APBN, APBD, CSR	DKP Prov., Dinas Perindustrian, KKP, Dinas Perhubungan																				
e	Kajian daya dukung dan daya tampung di zona industri	1.000	1 paket	APBN APBD	Kem. Perindustrian, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan																				
<b>1.6</b>	<b>Fasilitas Umum</b>																								
a	Identifikasi dan perencanaan kebutuhan Fasilitas Umum	1.000	3 paket	APBN, APBD, CSR	Dinas PU, Kementerian PU																				
b	Mencari dukungan Pembiayaan Pembangunan Fasilitas Umum dari dalam dan luar negeri	2.000	20 paket	APBN, APBD, CSR	Dinas PU, Kementerian PU																				
c	Pembangunan Fasilitas Umum (Masjid Terapung, Jembatan dan Lain-lain)	100.000	10 paket	APBN, APBD, CSR	Dinas PU, Kementerian PU																				
<b>1.7</b>	<b>Zona Hutan Mangrove</b>																								

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
a	Rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak	100.000	20 lokasi	APBD, APBN, CSR	Perguruan Tinggi, Dinas Kehutanan, Kementerian LHK, DKP, Swasta																				
b.	Pengembangan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat	10.000	10 lokasi	APBD, APBN, CSR	Dinas Kehutanan, Kementrian Kehutanan, Dinas Pariwisata, DKP																				
c.	Peningkatkan pemanfaatan hasil non kayu mangrove untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan	10.000	20 paket	APBD, APBN, CSR	Perguruan Tinggi, DKP, Swasta, Masyarakat, dan lain-lain																				
d	Pengembangan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove di Sumatera Barat	10.000	1 paket	APBD, APBN, CSR	Perguraun Tinggi, DKP, Swasta, Masyarakat, dan lain-lain																				
e	Penyadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian mangrove melalui sosialisasi, pemasangan papan himbauan, dan sejenisnya	10.000	20 paket	APBD, APBN, CSR	Perguraun Tinggi, DKP, KKP, Dinas Pariwisata, Swasta, Masyarakat, dan lain-lain																				
f	Pengelolaan kawasan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral	2.000	10 paket	APBD, APBN, CSR	Perguraun Tinggi, DKP, KKP, Dinas Pariwisata, Swasta, Masyarakat, dan lain-lain																				
<b>2</b>	<b>Konservasi</b>																								



No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan Nasional dan Daerah</b>																								
a.	Harmonisasi kelembagaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan Nasional dan Daerah	500	5 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi, Masyarakat,	■	■				■	■													
b.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan Nasional dan Daerah	1.000	4 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi					■					■					■					■
c.	Pengembangan jejaring kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau	1.000	10 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
d.	Membangun kemitraan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan	1.000	20 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
e.	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (terumbu karang, lamun, mangrove) di luar kawasan konservasi	20.000	10 lokasi	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP, BLHD, LSM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
f.	Pencadangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan daerah	1.000	4 lokasi	APBN, APBD, CSR, LSM	DKP Provinsi				■	■	■	■													

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
g	Penyusunan dan Penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan daerah	3.000	7 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
h	Pemberdayaan Masyarakat di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah	2.000	20 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi, LSM																				
i	Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan mata pencaharian alternatif	2.000	20 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi, LSM																				
j	Sosialisasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan Nasional dan Daerah	1.000	20 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
k	Penataan tanda batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan Nasional dan Daerah	5.000	7 lokasi	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
<b>2.2</b>	<b>Penguatan Kapasitas Kelembagaan SDM Pengelola Kawasan Konservasi</b>			APBN, APBD, CSR, LSM																					
a	Sosialisasi regulasi tentang konservasi dan rehabilitasi	1.000	20 Paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b	Bimbingan teknis monitoring dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan Nasional dan Daerah	1.000	10 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
c	Peningkatan pengendalian dan pengawasan di Kawasan Konservasi terkait pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya	1.000	6 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi, Institusi terkait pengawasan dan pengendalian																				
2.3	<b>Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Laut</b>																								
a.	Perlindungan habitat keanekaragaman hayati laut dari kerusakan	10.000	10 paket	APBN, APBD, CSR, LSM																					
b	Mengembangkan pemanfaatan keanekaragaman hayati/Jenis ikan dilindungi/tidak dilindungi secara berkelanjutan dan mensejahterakan	1.000	10 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
c	Penyadaran dan pembinaan terhadap masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan dilindungi/tidak dilindungi melalui sosialisasi, pemasangan papan himbauan, pelatihan, dan lain -lain	1.000	4 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
d	Menyusun model pengelolaan keanekaragaman hayati laut di Sumatera Barat	1.000	5 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
e	Pengkayaan keanekaragaman hayati laut dan melakukan upaya perbaikan habitat ekosistem Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	1.000	6 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP Provinsi																				
f	Kajian daya dukung dan daya tampung di Kawasan Konserasi	5.000	1 paket	APBN, APBD, CSR, LSM	KKP, DKP, Dinas Lingkungan																				
<b>3</b>	<b>Alur Laut</b>																								
<b>3.1</b>	<b>Alur Pelayaran</b>																								
a	Penetapan sistem alur pelayaran;	10.000	10 paket	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub																				
b	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran;	1.000	10 paket	APBD, APBN, LSM	Kemenhub, Dishub																				
c	Peningkatan pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran;	2.000	20 paket	APBD, APBN, LSM	Kemenhub, Dishub																				
d	Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran;	1.500	20 paket	APBD, APBN, LSM	Kemenhub, Dishub																				
e	Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.	100.000	18 paket	APBD, APBN	Kemenhub, Dishub																				
f	Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran perairan	1.000	18 paket	APBD, APBN, LSM	Dishub Prov, DKP, Dinas Lingkungan Hidup, DKP																				
<b>3.1</b>	<b>Migrasi Biota Laut</b>																								
a.	Penelitian migrasi penyu, mamalia laut dan ikan	3.000	6 paket	APBD, APBN,	DKP, KKP, Perguruan																				

No	Program Utama	Perkiraan Biaya Rp (Juta)	Volume	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				LSM	Tinggi																				
b.	Penetapan Alur Migrasi Penyu, Mamalia Laut dan Ikan	3.000	6 paket	APBD, APBN, LSM	DKP, KKP, Perguruan Tinggi																				
<b>4</b>	<b>Mitigasi Bencana</b>																								
a.	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	100.000	20 paket	APBD, APBN	BPBD, DKP, Dinkes,LSM																				
c.	Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan	100.000	20 paket	APBD, APBN	BPBD, LSM																				
d.	Penanganan tanggap darurat bencana	10.000	20 paket	APBD, APBN	BPBD,Dinkes, LSM																				
e.	Peningkatan bangunan pengaman pantai	500.000	20 paket	APBD, APBN	BPBD, PU, LSM																				

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO